

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Fokus penelitian ingin mengetahui bagaimana pemaknaan audiens terkhusus Swing Voters sebagai subjek penelitian terkait pesan politik dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan jajarannya menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 pada dokumenter Dirty Vote di akun youtube milik Dirty Vote. Dalam memahami sebuah asumsi yang dibangun pada film Dokumenter Dirty vote subjek penelitian yaitu selaku Swing Voters melalui sebuah unsur dalam proses komunikasi yang pertama adalah encoding suatu kegiatan memproduksi pesan, individu atau orang dalam kegiatan ini disebut enkoder, proses komunikasi yang kedua adalah decoding kegiatan sebaliknya dari proses encoding hal ini berkaitan dengan kegiatan untuk menerima atau memahami pesan (Moerdijati, 2016, P. 61-62)

Dengan hadirnya dokumenter Dirty Vote menjelang pelaksanaan pemilu 2024 memberikan berbagai bentuk bentuk penerimaan di kalangan audiens/khalayak yaitu swing voters, pesan pelaksanaan pemilu yang dihasilkan diantaranya adalah pesan mengenai pembicaraan kekuasaan, pengaruh dan otoritas. Penerimaan pesan oleh swing voters sebagai subjek penelitian didasarkan dengan berdasarkan field of experience (FOE) dan frame of reference (FOE). Konsep dari khalayak menunjukkan adanya sekelompok pendengar atau penonton film dokumenter yang memiliki

perhatian, resptif, tetapi relatif yang terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat publik (McQuail Denis, 2011, P.144) adanya pengalaman dan latar belakang yang beragam menimbulkan berbagai bentuk penerimaan atau interpretasi setiap individunya yang telah melihat tayangan dokumenter tersebut..

Variasi interpretasi audiens atas sebuah film sebagai produk budaya populer telah wajar terjadi dalam komunkasi massa film (ch, 2021. 3) film juga menjadi media komunikasi massa yang penting dalam memberikan informasi terhadap suatu kenyataan yang terjadi di kehidupan dan film juga dapat bercerita tentang realitas di masyarakat (hani & Nugroho, 2019.128) pandangan setiap penonton dalam melihat film memiliki pandangan serta pemaknaan yang berbeda beda. Judul merupakan sebuah kesan pertama dari audiens tentang sebuah cerita (industialscripts.com).

Menurut Sobur (2003) dalam (Belinda, 2022.166), penerimaan tidak dapat terjadi begitu saja ada latar belakang rangsangan/stimuli dari proses seleksi, pengelompokan, penafsiran dan reaksi dari dalam diri individu sehubungan dengan yang mereka olah. Penonton menerima pesan-pesan yang disampaikan dalam film sesuai dengan nilai dan pengalaman masing-masing diri penoton tersebut (Kusuma & Claretta, 2023). Judul film menjadi salah satu faktor produksi yang terlihat sepele namun memberikan pengaruh besar dalam keinginan penonton untuk menonton dan kesuksesan film secara menyeluruh. Sama hal nya dengan Film, Proses komunikasi juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia proses komunikasi diartikan pembuat pesan mengambil tempat sebagai sumber informasi atau sumber pembentuk

pesan (encoding) dan mengirim pesan melewati salah satu saluran komunikasi kepada penerima pesan atau komunikan. Stuart Hall ini menggaris bawahi pesan dikirimkan oleh pembuat pesan tidak serta merta dimaknai sesuai keinginan oleh khalayak (Riadiska & Tanjung, 2023). Saluran atau alat komunikasi yang umum digunakan antara lain surat kabar, telepon dan lain lain. Setelah pihak penerima pesan setelah menerima pesan komunikasi akan mencerna (decoding) dan menyampaikannya lagi (Muhammad et al., 2019).

Film dokumenter dikatakan sebagai saluran alat komunikasi yang diharapkan mampu memberikan encode pesan atau memproduksi pesan politik dan nantinya diharapkan Swing Voters selaku audiens aktif melakukan proses decoding penerjemahan atau pemaknaan dan nantinya pesan politik tersebut dapat diinterpretasikan. Pesan politik yang disampaikan dari runtutan peristiwa teks komunikasi dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dan jajarannya menjelang pelaksanaan pemilu 2024 pada dokumenter dirty vote ini yang hendak dimaknai secara berkalah oleh khalayak. Khalayak disini dianggap sebagai Swing Voters yang dapat memaknai dengan aktif bagaimana pembentukan pesan politik setelah melihat tayangan Teori penerimaan mengkaji bagaimana individu menerima dan menafsirkan konten media serta bagaimana menghadapi pengkhianatan individu (misalnya orientasi seksual, agama, ras, budaya, dan sebagainya) dalam sebuah media.

(Debby et al., 2020). Teori encoding-decoding dengan penerapan field of experience dan frame of refrence dengan fenomena political image Joko Widodo yang dihasilkan setelah melihat dokumenter dirty vote adalah bagaimana khalayak membentuk pesan(encode) yang disampaikan oleh dokumenter tersebut mengenai bentuk kepemimpinan Joko Widodo berdasarkan kebiasaan, budaya dan agama yang dianut orang tersebut (Frame of refrence). Setelah khalayak menerima dan membentuk pesan berdasarkan latar belakang orang tersebut berikutnya setelah menerima dan menginterpretasikan, khalayak akan mengartikan pesan yang ia terima dan menyampaikannya kembali(decode) berdasarkan pengalaman dan latar belakang yang pernah dialami oleh individu tersebut(field of experience).

Dalam proses penyampaian kembali atau decoding seluruh khalayak memiliki perspektif yang sama dalam memahami atau menerima pesan. Lain hal nya terdapat sekelompok individu yang cenderung diam dan tidak berani menyuarakan pendapat mereka, hal tersebut didasari mereka menyadari bahwa berada di tengah kelompok mayoritas. Hal tersebut dapat disebut sebagai Teori spiral ketenangan Elliabeth Noelle-Neuman. menunjukkan bahwa mereka memiliki opini minoritas mengenai isu-isu publik yang akan tetap menjadi latar belakang dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkomunikasi (West, Richard, 2017).

Pemaknaan audiens dalam memaknai rangkaian peristiwa pada dokumenter karya sutra dara Dandy Dwi Laksono tersebut tidak hanya semata mata di dukung oleh sebuah teks yang verbal saja namun bentuk bentuk komunikasi non verbal seperti

bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan penekanan nada. (Hadjira & Suranto, 2023). Kedua faktor pemaknaan teks verbal dan non verbal tersebutlah yang menurut peneliti dapat memberikan warna atau variasi dalam penerimaan teks pesan politik pada bagaimana dugaan kecurangan pemerintahan Joko Widodo dan jajarannya menjelang diadakannya Pemilihan umum 2024 pada dokumenter tersebut.

Ketika menunjukkan pesan politik terdapat sekelompok orang yang memproduksi Film dokumenter di Youtube yang berjudul *dirty vote* secara eksplisit dijelaskan bagaimana pembentukan pesan politik dalam Dokumenter karya sutradara Dandy Dwi Laksono di akun youtube resmi *Dirty vote*. Dandy Dwi Laksono selain merilis dokumenter *dirty vote* pada 2024 menjelang Pemilihan umum yang ingin menunjukkan substansi mengenai kecurangan pemilihan umum beliau juga melakukan hal yang sama dengan merilis *sexy killers* pada 2019 silam maka dari adanya fenomena rilis teks komunikasi serupa menjelang setiap pelaksanaan pemilihan umum peneliti ingin membandingkan kedua karya tersebut bagaimana adanya terdapat sekelompok orang yang hendak melakukan perlawanan dengan membuatnya menjadi teks komunikasi yang bertujuan untuk membuka mata khalayak adanya ketidak sempurnaan pada setiap periode masa jabatan seorang kepala negara.

Bertepatan dengan jelang pemilu 2019 Dandy Dwi Laksono juga membuat dokumentasi berjudul *sexy killers* Pada paruh kedua tahun 2018, sebuah film dokumenter berjudul "*Sexy Killers*" dirilis. Film yang dirilis *Watchdoc* di platform YouTube petualang ini sukses menyita perhatian publik. Film ini bercerita tentang

bagaimana masyarakat sekitar dan pertambangan batu bara dan pembangkit listrik skala besar saling mempengaruhi.

Tak hanya itu, *Sexy Killers* juga secara terbuka mengakui kesulitan yang dihadapi karyawan dan vendor di bisnis pertambangan. Mereka merasa nyaman dalam berbagai peran, termasuk pengawasan, administratif, dan sebagainya. "*Sexy Killers*" dokumenter Indonesia terbit pada 2019. Dokumenter tersebut mengangkat isu lingkungan dan sosial terkait industri pertambangan batu baradan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Selain itu saya berargumen bahwa tidak hanya membahas issue tentang lingkungan yang dapat disampaikan tentang dokumenter "*Sexy Killers*"

**Mengungkap Kebenaran yang Tersembunyi:** Dokumenter ini berhasil mengungkapberbagai praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan yang seringkali tersembunyi dari pandangan publik. Dengan menampilkan bukti nyata dan wawancara langsung dengan korban, film ini membuka mata masyarakat tentang dampak buruk industri batu bara di Indonesia. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:** "*Sexy Killers*" berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari ketergantungan pada energi fosil. Dengan penyajian yangmenarik, dokumenter ini berhasil menjangkau audiens yang lebih luas dan membuat isu ini menjadi perbincangan publik. **Mengkritisi Kebijakan Pemerintah:** Film ini secara kritis mengulas hubungan antara para pengusaha tambang dan pemerintah, menunjukkan

bagaimana kebijakan yang diambil seringkali lebih menguntungkan segelintir elit daripada kesejahteraan rakyat banyak. Ini penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan.

Namun berdasarkan opini peneliti dokumenter ini secara tidak langsung melihat sisi negatif dengan adanya beberapa faktor antara lain **Ketidakakuratan Data**: Beberapa kritik menyebutkan bahwa dokumenter ini mungkin menyajikan data yang tidak sepenuhnya akurat atau terverifikasi dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan misinformasi yang berpotensi menyesatkan penonton tentang situasi yang sebenarnya. **Terlalu Tendensius**: Ada argumen bahwa "Sexy Killers" bersifat terlalu tendensius dan tidak memberikan ruang bagi sudut pandang yang berbeda, terutama dari pihak industri atau pemerintah yang terlibat. Hal ini bisa membuat dokumenter ini terlihat bias dan tidak seimbang. **Potensi Penggiringan Opini**: Beberapa pihak berpendapat bahwa dokumenter ini bisa digunakan sebagai alat untuk menggiring opini publik dengan cara yang manipulatif, terutama dalam konteks politik tertentu. Ini bisa mengurangi kredibilitas dokumenter sebagai sumber informasi yang objektif. **Efek Negatif pada Industri dan Pekerja**: Dokumenter ini mungkin dapat menimbulkan efek negatif pada industri batu bara yang legal dan mematuhi peraturan, serta terhadap pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Jika tidak ditangani dengan bijak, hal ini bisa berdampak pada perekonomian lokal dan nasional.

Namun tujuan dari peneliti ingin memaknai dokumenter dirty vote bukan Sexy Killers karena berdasarkan runtutan dokumenter, dirty vote memiliki kompleksitas

yang jauh lebih tinggi mengenai dugaan kecurangan pemilihan umum hal tersebut di buktikan dengan serangkaian peristiwa yang tidak hanya seorang kepala negara saja yang melakukan kecurangan namun hingga aparatur sipil negara tingkat menteri kabinet hingga kepaladesa juga semata mata melakukan dugaan kecurangan ingin memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada 2024 menjelang berlangsungnya pesta demokrasi Sutradara Dhandy Dwi laksono membuat film dokumenter yang kali ini melihat bagaimana pemerintahan jokowi selama dua periode dan menteri kabinetnya, dan tidak lupa kebijakan serta “statement” yang dilontarkan selama kurun waktu 10 Tahun Film Dokumenter “Dirtyvote” yang rilis pada 11 febuari 2024 mewarnai menjelang berlangsung nya PEMILU 2024 di Indonesia, karya besutan sutradara Dandy Dwi laksono mampu menggemparkan indonesia dengan mengangkat kecurangan yang terjadi padaPemilihan Umum 2024, dokumenter kedua setelah “Sexy killer” pada tahun 2019 silammampu meraup jumlah penonton 9.7 juta penonton (3 Maret 2024)

**Gambar I.1**  
**Thumbnail dokumentert dirty vote**



**Sumber: youtube.com**

Film ini diperankan dengan narasumber film yakni Dr zainal Arifin Mochtar yang merupakan seorang pengajar dalam bidang hukum dan tata negara di Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta dikenal sebagai penggiat anti korupsi dan di beberapa kesempatan tampil pada acara Indonesi Lawyer Club yang ditayangkan TVOne dan dipercaya menjadi moderator pada debat Capres dan Cawapres 2014. Berikutnya Feri Amsari S.H., M.H., LL.M. pakar hukum tata negara. kesempatan tampil pada acara Indonesi Lawyer Club yang ditayangkan TVOne dan dipercaya menjadi moderator pada debat Capres dan Cawapres 2014. Berikutnya Feri Amsari S.H., M.H., LL.M. pakar hukum tata negara.

Berikutnya salah satu narasumber wanita pada film dokumenter ini adalah Bivitri Susanti, S.H., LL.M wanita yang kerap disapa dengan nama Bibi adalah seorang akademisi dan pakar hukum tata negara salah satu pendiri PSHK (Pusat Studi Hukum & kebijakan Indonesia).

Sebagai penggiat pembaruan hukum, anti korupsi dan hak hakkonstitusi. Setiap opini yang dipaparkan oleh ketiga pakar hukum tatanegara mengkritisi bagaimana terjadinya pemeliharaan umum 2024, opini berisikan pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau prefrensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi dan bersifat tidak objektif dikarenakan belum adanya pemastian pengujian (Ratnawati, 2018). Diawal dokumenter opini Dr Zainal Arifin Mochtar memaparkan bagaimana adanya perbedaan yang sangat signifikan posisi Presiden Jokowi jauh sebelum adanya pemilihan umum 2024 dan mendekati pemilihan umum 2024.

**Gambar I.2**  
**Perbedaan opini Presiden Joko Widodo sebelum dan menjelang Pemilu**



**Sumber : youtube.com**

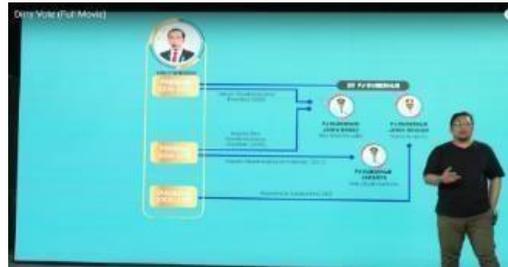
Posisi Jokowi yang tidak netral jelang pemilu dan jauh sebelum pemilu tidak sesuai dan melanggar penerapan Pasal 2 Undang Undang No 5 Tahun 2014 menyebutkan “setiap ASN (Aparatur Sipil Negara harus patuh pada asas netralitas dengan tidak melihatkan keberpihakan dari berbagai bentuk pengaruh kemudian tidak melakukan keberpihakan secara pribadi atau kelompok. Seorang calon presiden dinyatakan Sah terpilih Berdasarkan pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menjelaskan syarat bagi seorang seorang calon presiden dan wakil presiden dapat terpilih adalah mendapatkan lebih dari lima puluh persen jumlah suara, dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar dari jumlah setengah provinsi.

Provinsi Papua Pada pilpres 2014 dan 2019 adalah provinsi dimana Jokowi unggul di provinsi tersebut. Hal yang menjadi perhatian pada saat itu Titokarnavian menjadi kapolda Papua hingga saat ini Titokarnavian menjadi menteri dalam negeri melalui pelantikan pada tahun 2019 Hal yang menarik adalah bagaimana rekam jejak seorang kapolda Papua dalam kurun waktu 5 tahun mendapat jabatan sebagai

Tito Karnavian ketika Joko Widodo majusebagai Calon presiden 2014 dapat terdapat kenaikan pangkat yang luar biasa cepat, ketika Joko Widodo menang pada pemilihan Presiden 2014 ketika Tito menjabat sebagai kapolda Papua(21 September – 16 Juli 2014), Jokowi memboyong Tito menuju ke kapolda metrojaya pada (12 Juni 2015-16 Maret 2016), berikutnya tidak sampai setahun Tito Karnavian sebagai Kapolda Metrojaya 13 Juli 2016 Tito karnavian di angkat sebagai kepala kepolisian negara republik Indonesia dan hanya berselang 3 tahun

Tito karnavian di angkat menjadi menteri dalam negeri kabinet Indonesia maju 23 Oktober 2019. Sebagai contoh pengangkatan gubernur jawa barat Bayu Mahmudin yang pernah menjadi deputy sekretariat presiden 2016 dan kepala biro sekretariat presiden 2016, berikutnya pejabat gubernur Jakarta Heru Budi Hartanto yang pernah menjabat sebagai kepala sekretariat presiden 2017. Berikutnya pejabat gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana yang pernah menjabat sebagai kapolresta surakarta 2010 yang dikaitkan dengan posisi Joko Widodo kala itu yang masi menjadi walikota Solo.

**Gambar I.3**  
**Bagan Pejabat Gubernur yang memiliki keterkaitan dengan Presiden Joko Widodo**



**Sumber: youtube.com**

Jejak digital pada Internet sebagai ruang yang bisa melibatkan siapa saja (Nasrullah, n.d.). Memperlihatkan bagaimana pengangkatan pejabat gubernur yang tidak sesuai, melihat adanya tidak netralan pejabat daerah atau gubernur menjelang pemilihan umum seperti PJ gubernur Kalimantan barat secara persuasif Lusiana Suherman dengan jelas mempersuasif rakyat pada saat berorasi untuk memilih presiden yang melakukan pembangunan IKN Ibu Kota Negara yang mengarah kepada presiden Joko Widodo.

Tindakan persuasi (percuasion) adalah suatu proses dalam melakukan tindakan meyakinkan, berargumentasi atau merujuk oleh pendapat seorang pakar (expert advice) (Mariam, 2017, p. 61)Selanjutnya Bivitri susanti mengkritisi bagaimana kecurangan terjadi yang tidak hanya pada pejabat daerah namun bentuk kecurangan hingga terjadi di pejabat negara .Berdasarkan fenomena dugaann kecurangan pemilihan uumum 2024 yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dengan jajaranya peneliti ingin menekankan mengenai

Konteks dari penelitian adalah ingin mengetahui bagaimana penerimaan dari swing voters mengenai dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo menjelang diadakannya pemilihan umum 2024 yang kurang sesuai dan banyaknya dugaan praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala negara hingga pada tingkat menteri kabinet, pejabat gubernur kabupaten atau kota, disini peneliti ingin mengetahui bagaimana Swing Voters sebagai subjek penelitian kedua memaknai adanya dugaan kecurangan pemilihan umum 2024.

Swing Voters sendiri merupakan segmen Audiens aktif yang diperebutkan dalam pemilu salah satu segmen swing voters (Witianti et al., 2023). Swing voters mempunyai kecenderungan untuk berpindah karena dua alasan, pertama mereka memilih partai lain pada pemilu sebelumnya, inilah yang disebut dengan pemilih tidak setia yang kemudian berpindah ke partai lain. (Cahyani et al., 2022) mengatakan pemilih bergerak bukan dalam arti rasional tapi secara pragmatis. Namun penentuan seorang dapat dikatakan Swing tidak adanya batasan dan rentan usia tertentu. Namun penentuan peneliti seseorang dapat dikatakan swing voters berdasarkan bagaimana seseorang yang dapat dikatakan loyalis sebelumnya kepada salah satu pasangan melakukan pergeseran menjadi enggan memihak hal yang sama lagi di dasar karena adanya kelemahan dan kekurangan yang menurut individu tersebut tidak sesuai dilakukan oleh paslon tersebut berdasarkan pemaknaan atau penerimaan yang diterima oleh audiens.

**Gambar I.4**  
**Penyalahgunaan wewenang menteri kabinet Joko Widodo**



**Sumber: Youtube.com**

Pembagian bantuan sosial seolah olah hanya sebuah nama, namun maksud dibalik diselenggaranya pembagian bantuan sosial tersebut adalah Kampanye. Menurut undang undang nomor 1 Tahun 2015 kampanye adalah kegiatan peserta pemilu dalam meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Serta adapun dari jenis jenis kampanye menurut keputusan KPU No.35 Tahun 2004 yang mengatur 9 jenis kampanye diantaranya, Debat dengan publikterbuka Kegiatan yang tidak melanggar undang undang, memasang alat peraga/kampanye di tempat umum, melakukan sebaran bahan kampanye pada khalayak umum, menyebar melalui media cetak atau elektronik, melalui radio atau televisi, pertemuan terbatas, rapat umum dan tatap muka dan dialog. Bantuan sosial juga diartikan dengan melakukan pemberian bantuan dengan bentuk baik berupa barang/nominal melalui pemerintah daerah dengan tujuan nya melalui individu/kelompok yang bersifat sementara dan selektif (Fadilah et al., 2021)

Airlangga Hartanto secara terang terangan melakukan pembagian bansos di Mandalika 14 Januari 2024 dengan imbuhan untuk mengucapkan kalimat “terimakasih Jokowi” dengan memberikan arah untuk di dokumentasikan. Pada gambar diatas menjelaskan bagaimana Prabowo Subianto yang menjabat menjadi menteri pertahanan menggunakan fasilitas negara seperti pesawat tempur yang dimiliki TNI AU kepentingan pribadinya dalam berkampanye di kota Padang, dan yang berikutnya adalah akun X resmi kementerian pertahanan mengguah salah satu unggahan dengan menggunakan tanda pagar #PrabowoGibran2024. Bivitri mengambil contoh bagaimana menteri pertahanan Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024 Syarat utama bagaimana seorang menteri dapat berkampanye adalah dengan mengajukan cuti, cuti diartikan keadaan tidak dalam bekerja dengan ijin yang diberikan dalam jangka waktu tertentu (Rohendi, 2015)

**Gambar I.5**  
**Bagan kenaikan Bansos 2014-2024**



Dirty Vote (Full Movie)

**Sumber: Youtube.com**

Statistik data anggaran untuk pemberian Bantuan sosial yang cenderung memilikkenaikan anggaran bantuan sosial, bantuan sosial meroket ketika menjelang pemilu di 2014,2019,2024 di bulan Januari 2024 saja telah menghabiskan dana sebesar 78,06 T untuk pembagian bantuan sosial. Bantuan sosial di era presiden jokowi se akan akan menjadi bantuan politik ketika memasuki masa pemilihan umum. Bantuan sosial

yang menjadi Fasilitas atau inventaris negara yang seharusnya pembagiannya menjadi wewenang kementerian sosial. Lantas apa yang membuat Bantuan sosial dijadikan alat dalam berpolitik, Bivitri Susanti mengkaitkan peristiwa penggunaan uang negara dalam bentuk bantuan sosial menjadi alat berpolitik dengan istilah “pork barrel politics” secara sederhana politik gentongbabi dikenalkan oleh farejohn untuk mengungkap fenomena serupa dikatakan sebagai usaha yang dilakukan petahana untuk memperoleh alokasi dana dan membawa konstituen (pembentukan unsur kecil yang disusun membentuk satuan yang lebih besar) mendapat sebuah insentif agar kembali memilih petahana di periode selanjutnya (Saragintan & Ri, 2016)

**Gambar I.6**  
**Politik gentong babi ala Joko Widodo**



**Sumber : Youtube.com**

Dengan memperebutkan jata resmi (bansos) untuk berpolitik dalam penerapannya presiden sedang tidak meminta untuk dipilih namun, mengarah kepada sang anak sulung Gibran Raka Buming Raka. Selain mengkritisi bagaimana bantuan sosial yang seharusnya menjadi ranah pekerjaan dari kementerian sosial Republik Indonesia. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyikapi bagaimana penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh menteri kabinet presiden Joko Widodo. Detorument diartikan sebagai menyimpang, pembelokan, penyelewengan, kekuasaan menurut hukum (Mardzuki, 212012).

### **Gambar I.7**

#### **Cuplikan pada kolom komentar dokumenter Dirty vote**



#### **Sumber : kolom komentar dokumenter dirty vote**

Melalui runtutan peristiwa yang terjadi dan di soroti menjadi perdebatan yang hangat di dalam dokumenter dirty vote alhasil menimbulkan berbagai penerimaan/pemaknaan bagaimana terkait pesan politik menjelang diadakannya Pemilihan Umum serentak 2024. Akibat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo menimbulkan berbagai spekulasi atau dugaan yang sangat beragam akibat dari penerapan Pemilihan Umum 2024. Hal tersebut di tunjukan dari berbagai cuitan di kolom komentar dokumenter dirty vote. Swing Voters sebagai subjek kedua setelah dokumenter dirty vote di hadapkan pada posisi yang membingungkan berbagai dugaan adanya penyalagunaan kekuasaan dan wewenang pada pemerintahan Joko Widodo seakan akan menginginkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menempati kursi wakil presiden republik Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan beragamnya pesan atau cuitan pada kolom komentar dirty vote.

Variasi tanggapan khalayak mengenai beragam spekulasi mengenai hadirnya tayangan Dirty Vote pada platform youtube menghasilkan beragam pemberitaan sebagai contoh pada UNAIR NEWS (13/02/2024) Dr Suko Widodo Drs M Si, pakar

komunikasi politik sekaligus dosen komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga memberikan tanggapan mengenai perilsan film (dirty vote) menurut suko atensi publik mengenai dokumenter tersebut terbentuk dari narasi kecurangan pemilu yang telah tumbuh sejak lama. Munculnya film dirty vote perlu juga dipahami bahwa banyak masyarakat mempertanyakan mengenai legitimasi pemerintah mengenai asas netralitas Pemilu.

Variasi tanggapan berikutnya pada dokumenter Dirty Vote melalui pemberitaan media TEMPO.COM (15/02/2024) menjelaskan berdasarkan berbagai tokoh pemenangan nasional tiap calon presiden mengenai rilisnya dokumenter itu antara lain: Amin Iwan Tariganjuru bicara timnas menjelaskan film dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan suatu golongan mereka kata iwan melalui keterangan tertulis pada, 11 Febuari 2024, berikutnya adalah Wakil ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman sebageian besaryang disampaikan film itu adalah bernada fitnah dan narasi kebencian, saya sangat menanyakan kepasitas tokoh tokoh di film tersebut. Selanjutnya adalah deputi hukum TPN Ganjar-Mahfud banyak hal hal positif dalam film itu walaupun anda tentu boleh tidak setuju namun film tersebut adalah pendidikan politik yang bagus ujar Todung di Media Center Gaanjar – Mahfud, Menteng jakarta pusat pada Ahad 11 Febuari 2024.

Pesan pesan politik terkait bagaimana pelaksanaan pemilihan umum 2024 menimbulkan berbagai penerimaan di kalangan masyarakat selanjutnya adalah cuitan

@ronitidin1513 ia menuliskan komentar pada kolom dokumenter dirtyvote “memang benar tidak ada calon yang sempurna, tapi ada calon yang benar benar tidak boleh lagi berkuasa” cuitan tersebut menimbulkan dugaan bagaimana keberlangsungan pemerintahan Joko Widodoyang menurut nya secara ekspilist tidak boleh lagi adanya campur tangan Joko Widodo pada pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut sejalan dengan pesan politik mengenai pembicaraan pengaruh pada pesan politik menurut David V.J Bell dalam (Nimmo Dan, 2011) ia menyebutkan pembicaraan pengaruh dapat mempengaruhi orang lain dengan nasihat, dorongan, permintaan dan peringatan kunci dari pembicaraan pengaruh adalah bagaimana si pembicara berhasil menipu persepsi atau harapan orang lain terhadap kemungkinan mendapatkeuntungan atau kerugian. Hal tersbut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Prabowo Subianto beliau akan melanjutkan program yang telah diusung dan di rancang oleh Joko Widodo campur tangan seorang Joko Widodo dalam pasangan Prabowo-Gibran memberikan pengaruh yang cukup besar untuk masyarakat memilih paslon nomer urut 2 pada pemilihan umum 2024.

Penekanan dari konteks penelitian ialah ingin melihat bagaimana reaksi Audiens (Swing Voters) menanggapi penerimaan teks komunikasi pesan politik dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan jajarannya menjelang pelaksanaan diadakannya pesta demokrasi 2024, peneliti merangkum menjadi 3 peristiwa yang cukup menggambarkan atas dugaan kecurangan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo melaluperistiwa tidak menjunjung netralitas yang dibuktikan dengan

perkataan verbal seorang kepala negara yang mendukung, marak terjadinya pengangkatan PJ gubernur dan kepala daerah yang tidak sesuai dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dan pembagian bantuan sosial negara yang digunakan sebagai alat untuk berkampanye sehingga membuat anggaran bantuan sosial selalu naik pada 2019 dan 2024 menjelang pesta demokrasi pada pemerintah Joko Widodo.

Penulis melihat adanya penelitian sejenis dengan penggunaan metode “Analisis Resepsi Khalayak Atas Popularitas Instan Video Youtube Keong Racun Sinta dan Jojoe.”. Dalam penelitian milik Any Suryani pada tahun 2013 dan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis resepsi. Meskipun menggunakan media yang sama yaitu di Youtube, subjek pada penelitian sebelumnya adalah khalayak dan video “Keong Racun Sinta dan Jojoe”. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh (Choriyanti 2018) berjudul “manifestasi pragmatisme pendidikan politik (analisis resepsi pada komodifikasi berita selebritin politisi)” dengan subjek penelitian yang dimiliki oleh Choriyanti adalah sekelompok selebriti politisi dengan menggunakan metode resepsi milik Stuart Hall dan melakukan pengumpulan data dengan in depth interview dengan informan yang telah ditentukan dan diharapkan data tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang masalah yang ada di ambil rumusan masalah dengan penelitian ini adalah : Bagaimana penerimaan para swing voters terhadap pesan politik dugaan kecurangan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo jelang pelaksanaan

pemilu 2024 pada rangkaian teks komunikasi dokumenter Dirty Vote?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi penerimaan oleh swing voters mengenai pesan politik dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo jelang pemilu pemilu 2024 pada dokumenter dirty vote.

### **I.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek dari penelitian yang akan diteliti ialah dokumenter dirty vote serta penonton dokumenter tersebut dan narasumber nya ialah swing voters. Kriteria telah melakukan pemilihan umum lebih dari 2 kali.
2. Objek penelitian yang akan diteliti adalah penerimaan swing voters terhadap pesan politik menjelang pelaksanaan pemilu 2024 pada dokumenter dirty vote.

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat yang didapat oleh peneliti dari penelitian ini yaitu :

#### **I.5.1 Manfaat Akademis**

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam kajian ilmu komunikasi dengan bidang kajian analisis resepsi terkhusus dalam pesan politik dengan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

### **I.5.2 Manfaat Praktis**

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan sarana pembelajaran terhadap penerimaan voters dengan tujuan dapat mengetahui pesan politik menjelang pelaksanaan pemilu 2024 untuk mengekspresikan dirinya melalui dokumenter dirty vote.